LAPORAN

KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

KPU KOTA BONTANG

Jl. Awang Long No. 68
Kel Bontang Baru
Kec. Bontang Utara
Kota Bontang

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban KPU Kota Bontang dalam melaksanakan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Hasil kinerja KPU Kota Bontang yang beriorentasi pada *output* dan *outcome* ini juga diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Govermnent.*

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja KPU Kota Bontang dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di kota Bontang.

Bontang, 25 Januari 2026
Ketua KPU Kota Bontang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Muzarroby Renfly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*
DAFTAR ISI ..... *ii*
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..... *iii*
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... *iv*
BAB I PENDAHULUAN *1*
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN 1
1. Tugas 2
2. Wewenang 2
3. Kewajiban 4
4. Struktur Organisasi 5
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA *12*
A. RENCANA STRATEGIS 12
B. PERJANJIAN KINERJA 14
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA *17*
A. CAPAIAN KINERJA 17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 19
BAB IV PENUTUP *33*
A. KESIMPULAN 33
B. RENCANA TINDAK LANJUT 34
LAMPIRAN *35*

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 8
Tabel 2 13
Tabel 3 14
Tabel 4 15
Tabel 5 18
Tabel 6 19
Tabel 7 20
Tabel 8 23
Tabel 9 32

Gambar 1 8
Gambar 2 9
Gambar 3 10
Gambar 4 21
Gambar 5 22
Gambar 6 26
Gambar 7 27
Gambar 8 29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk:

1. mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 22E Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
    a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
    b. Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
    c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
    d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
    e. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang Tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp. 6.000.033.000,- dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 5.965101.910,- atau sebesar 99.42 persen. Data-data pendukung pengukuran akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum selama kurun waktu 1 tahun, didapat dari laporan tiap Triwulan dari UKE II di lingkungan KPU Kota Bontang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pemilu anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dljamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Selain menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang diukur melalui Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur dan Gambaran Tingkat keberhasilan pencapaian Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang selama tahun 2024.

B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Pada pasal 12 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
c. menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pada pasal 13 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang:

a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
c. menetapkan Peserta Pemilu;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPUyang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan

Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pada pasal 14 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKPP; dan

n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta mengimplementasikan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu bersifat hirarkis, serta dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Susunan dan keanggotaan Anggota KPU Kota Bontang yaitu berjumlah 5 (Lima) orang, yang terdiri dari atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 Anggota dan melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam bentuk Divisi, yaitu meliputi:

1) Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. penyusunan program dan anggaran;
b. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
c. protokol dan persidangan;
d. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
e. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
f. monitoring, evaluasi dan pengendalian program.

2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. sosialisasi kepemiluan;
b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
c. publikasi dan kehumasan;
d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
e. kerja sama antar lembaga; dan
f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

3) Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
d. pengendalian informasi; dan
e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.

4) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
a. rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
b. penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
c. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

d. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
e. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
f. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
g. penelitian dan pengembangan kepemiluan.

5) Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
b. verifikasi partai politik dan DPD;
c. pencalonan Peserta Pemilu;
d. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu;
e. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
f. penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
g. pelaporan dana kampanye; dan
h. penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.

6) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
b. telaah hukum dan advokasi hukum;
c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
d. dokumentasi dan publikasi hukum;
e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Gambar 1
Anggota KPU Kota Bontang

Divisi dan wakil divisi KPU Kota Bontang diputuskan dengan Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Periode 2024-2029. Adapun Divisi kerja KPU dan penanggung jawabnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Divisi dan Penanggungjawab KPU Kota Bontang

No	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Muzarrobby Renfly	Ketua	Keuangan,Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Hamzah	Wakil Ketua	
2.	Rina Megawati H	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Acis Maidy Muspa	Wakil Ketua	
3.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Muzarrobby Renfly	Wakil Ketua	
4.	Acis Maidy Muspa	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Ozzie Osbourne Hannaniel	Wakil Ketua	
5.	Hamzah	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Rina Megawati H	Wakil Ketua	

Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang diambil oleh Anggota KPU Kota Bontang didukungan dari Sekretariat KPU Kota Bontang sebagai pelaksana

kebijakan, unit pendukung administrasi pelayanan dan pendukung teknis.

Dalam meningkatkan tugas dan fungsi dari Sekretariat. KPU telah melakukan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Struktur organiasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kota Bontang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bontang

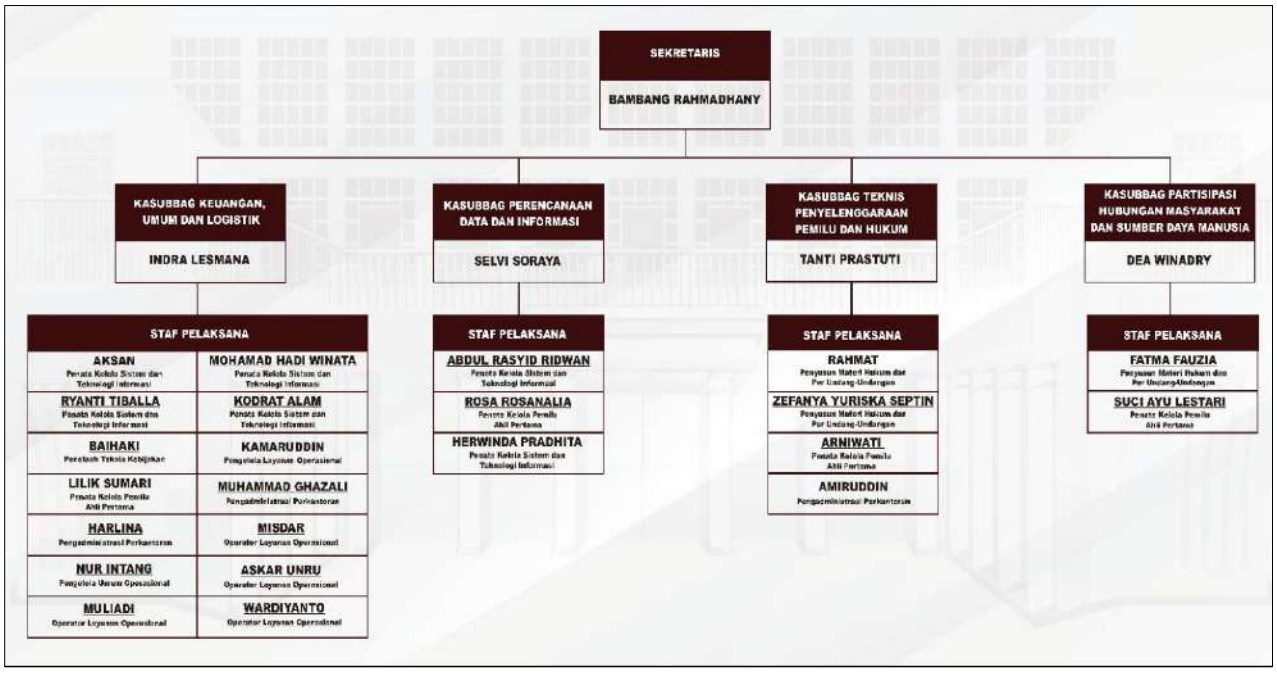

Komisi Pemilihan Umum memiliki sumber daya manusia sejumlah 33 (Tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggota KPU sejumlah 5 (lima) orang;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 16 (enam belas) orang;
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat sejumlah 12 (sepuluh) orang;

Gambar 3
SDM KPU Kota Bontang

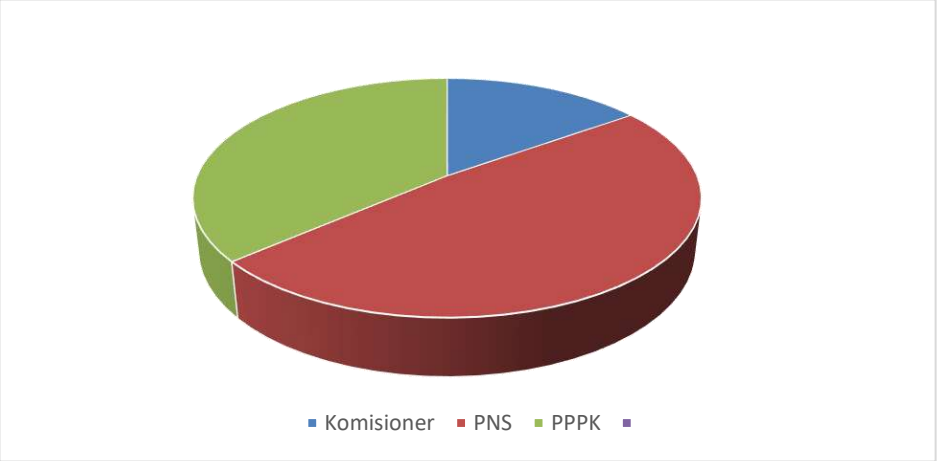

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Bontang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja KPU sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organiasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organiasi serta permasalahan utama *(strategis issued)* yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Keberhasilan pelaksanaan Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Priode 2025-2029 yang menjadi Prioritas Nasional. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga prioritas nasional tersebut yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
3. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Dalam mendukung Prioritas Nasional Komisi Pemilihan Umum Rencana Strategis dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi *"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045"*

Misi:

a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan

c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2
Target Kinerja dari Indikator Kinerja KPU Kota Bontang 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan**						
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90%	95%	97%	99%	100%
2.	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**						
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL	100%	100%	100%	100%	100%
3.	**Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien**						
	Terwujudnya Kelembangaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72	73	75	78	80
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		NilaiTerhadap CapaianIndikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *(outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis. KPU telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan berdasarkan rencana strategis KPU Kota Bontang Tahun 2020-2024. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja dan target dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	**Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan**		
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90%
2.	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**		
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL	100%
3.	**Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien**		
	Terwujudnya Kelembangaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai SAKIP KPU	70
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%
		Indeks Pengelolaan Aset	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75
		Nilai Terhadap CapaianIndikator Kinerja Utama (IKU)	87
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang. Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran KPU Kota Bontang Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.435.653.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	2.435.653.000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.564.381.000
3355	Pengelolaan Keuangan	3.219.980.000
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344.401.000
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.542.895.000
TOTAL		**6.000.033.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah hasil nyata (*output/outcome*) yang dicapai suatu individu, unit kerja, atau organisasi dalam kurun waktu tertentu, diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, serta menjadi dasar akuntabilitas dan perbaikan kinerja di masa depan. Ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi anggaran, kepuasan pelanggan, dan lainnya.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi KPU. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan kinerja KPU Kota Bontang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi KPU.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, Komisi Pemilihan Umum mencantumkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja sesuai Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Bontang Tahun 2025. Berikut capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025:

Tabel 5
Realisasi dan Capaian Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90%	88,53%	98%
2.	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%
		Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Kelembangaan KPU yang Bersih dan Akun tabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	96,39	121%
		Nilai SAKIP KPU	70	72,2	103%
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	80,38	89,3%
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72	88,53	122,9%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	77%	100%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	100%
		Tingkat Maturitas SPIP	75	75	100%
		Nilai Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	87	100%
		Tingkat Digitalisasi Arsip	87	87	100%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	90	100%

Keterangn:

**Nilai Sakip KPU Kota Bontang menggunakan realisasi tahun 2024;*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 9 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu Pemilihan

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu Pemilihan" adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator Kinerja 1

IK 1	Indeks Pelayanan Publik				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	90%	88.53%	98%

1. Indeks Pelayanan Publik

Sebagai salah satu penyedia layanan publik Tahun 2025. KPU Kota Bontang melakukan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat adalah dengan kuesioner melalui cara responden mengisi sendiri dengan dikirim link daftar pertanyaan. Responden yang dijadikan sampel adalah masyarakat atau pihak-pihak pengguna layanan yang mendapatkan layanan yang mendapatkan layanan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2025 KPU Kota Bontang diperoleh indeks persentase sebesar 88.53 persen hasil ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90 persen dengan capaian 98 persen.

Tidak tercapainya target dari Indeks Pelayanan Publik berdasarkan analisa dari survei tersebut dipengaruhi dari dua indikator yang menjadi bahan survei yaitu:

a. Indikator Kemudahan Prosedur Pelayanan; dan
b. Indikator Kualitas Sarana dan Prasarana.

Kedua indikator tesebut saling berkaitan mengingat kualitas sarana dan prasarana akan mempengaruhi kemudahan dalam proses pelayanan

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

khususnya di KPU Kota Bontang. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran seperti pengadaan sarana dan prasarana pelayanan seperti Komputer untuk pelayanan informasi sehingga masih menggunakan perangkat yang lama. Untuk kedepannya KPU Kota Bontang berkomitmen dalam memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan Sesuai Ketentuan yang Berlaku" adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Indikator Kinerja 2 dan 3

IK 2	Persentase Data Pemilih yang Terdata				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%
IK 3	Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

2. Persentase Data Pemilih yang Terdata

Dalam pendataan Pemilih, KPU Kota Bontang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2025. Tahun 2025 KPU Kota Bontang menetapkan 137.657 (seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh) pemilih dangan 71.037 (tujuh puluh satu ribu tiga puluh tujuh) pemilih laki-laki dan 66.620 (enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh) pemilih perempuan berdasarkan Berita Acara Nomor: 121/PL.01.2-BA/6474/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Bontang dalam melakukan pendataan Pemilih melalui PDPB tahun 2025 sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi dari tingkat kelurahan sampai tingakat kecamatan dengan tujuan memberi pemahaman tentang PDPB kepada aparat RT, Kelurahan dan Kecamatan termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas di masing-masing Kelurahan;
b. Melakukan rapat koordinasi terkait dengan PDPB dengan *stakeholder* yang ada di Kota Bontang. Kegiatan ini selain melakukan sosialisasi juga untuk menerima saran dan masukan dari pemangku kepentingan terkait langkah dan cara yang akan dilakukan KPU Kota Bontang. Yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut seperti dari Dandim Bontang, Polres Bontang, Disdukcapil Kota Bontang, Bakesbangpol Kota Bontang, Lapas Kelas IIA Bontang dan Bawaslu Kota Bontang;
c. Rapat pleno terbuka PDPB yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, tahun 2025 penetapan PDPB dilakukan pada semester dua, semester tiga dan semester empat. Sedangkan untuk semester satu tidak dilakukan penetapak dikarenakan masih masuk dalam tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang;
d. Posko layanan PDPB, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat Kota Bontang yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, mengalami perubahan data atau terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia. Posko ini bisa diakses secara *offline* dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Bontang atau secara *online* dengan masuk ke link https://bit.ly/tangmaspdpbbtg2025

Gambar 4
Rapat Koordinasi dan Pleno PDPB Tahun 2025

3. Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL

Kota Bontang melakukan Pemutakhiran data Parpol secara berkelanjutan melalui Sipol hal ini merupakan kegiatan penting sebagai upaya mitigasi penataan administrasi atas situasi perubahan kepengurusan Partai Politik di tiap tingkatan yang dinamis dan teknologi digitalisasi Sipol mempermudah proses tersebut.

Pemutakhiran data Parpol secara berkelanjutan dimulai dengan melakukan sosialisasi ke Partai Politik dan penunjukan petugas penghubung. Penting bagi Parpol menunjuk petugas penghubung yang memiliki wewenang untuk mengikuti alur pemutakhiran data mulai dari pengisian data, pengunggahan dokumen, sampai penyampaian data hasil dan melakukan komunikasi dengan KPU melalui layanan *helpdesk* Sipol.

Gambar 5
Sosialisasi Pemutakhiran Data Parta Politik

Tahun 2025 terdapat 8 Partai Politik tingkat Kota bontang yang melakukan pemutakhiran data dan dokumen melalui Sipol yaitu:

- Partai Golongan Karya
- Partai NasDem
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Rakyat Adil Makmur

SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegrasi serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegrasi serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai" adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Kinerja 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan 14

IK 4	Indeks Reformasi Birokrasi				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	80	96,39	121%
IK 5	Nilai SAKIP KPU				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
	66,20	71,55	70	72,25	103%
IK 6	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%
IK 7	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	90%	80.38%	89,3%
IK 8	Persentase kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	78,8%	88,78%	72%	88,53%	122,9%
IK 9	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	77%	77%	100%
IK 10	Indeks Pengelolaan Aset				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	3	3	100%
IK 11	Tingakat Maturitas SPIP				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	75	75	100%
IK 12	Nilai Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian

-	-	-	87	87	100%
IK 13	Tingkat Digitalisasi Arsip				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	60	60	100%
IK 14	Indeks Tata Kelola Pengadaan				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	90	90	100%

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang diwujudkan dengan membentuk kelompok- kelompok kerja yang difokuskan pada 8 (delapan) area perubahan. Kelompok kerja ini merupakan bagian dari tim reformasi birokrasi yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Selanjutnya setelah terbentuk tim reformasi birokrasi, delapan area perubahan tersebut dibuatkan rencana aksi kegiatan reformasi birokrasi.

KPU Kota Bontang pada tahun 2025 memperoleh indeks reformasi birokrasi 96,39 dari target 85 dengan persentase 113 persen realisasi melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian dari angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Tidak adanya pelanggaran selama tahun 2025 baik yang dilakukan Komisioner maupun dari Sekretariat;
b. Banyak inovasi yang dibuat di area manajemen perubahan;
c. Penataan dan publikasi peraturan perundang-undangan.

5. Nilai SAKIP KPU

Penerapan SAKIP merupakan wujud komitmen KPU Kota Bontang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui implementasi SAKIP, KPU Bontang berupaya memastikan bahwa seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara terukur dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 yang diterima tahun 2025. KPU Kota Bontang memperoleh nilai SAKIP sebesar 72,25 persen dari target 70 persen dengan persentase 103 persen realisasi, capaian tersebut

berada diatas dari target yang sudah ditetapkan. Meski demikian terdapat catatan hasil evaluasi SAKIP yaitu:

a. IKU KPU Kota Bontang belum sepenuhnya menyajikan informasi terkait cara pengukuran dan formulasi pengukuran yang tepat dan belum menyajikan informasi terkait definisi operasional, target dan Penanggung jawab;
b. Laporan Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun berturut-turut;
c. Laporan Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun berturut-turut;
d. Tidak adanya pohon kinerja yang menggambarkan hubungan crosscutting pada dokumen perencanaan kinerja. misalnya sasaran kinerja terkait bimtek peraturan pemilu tidak hanya tanggungjawab subbagian hukum namun juga tanggung jawab subbagian parmas;
e. Belum adanya tabel monitoring dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, terdiri dari rencana kinerja, realisasi, kendala/hambatan, upaya yang dilakukan yang melibatkan seluruh bagian.

Dari catatan hasil evaluasi SAKIP tersebut di atas, KPU Kota Bontang berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan melaksanakan semua catatan dari penilaian SAKIP di tahun 2026.

6. Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda

Keberadaan data yang tidak valid dan pemilih ganda berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih, antara lain ketidakakuratan jumlah pemilih, potensi penyalahgunaan hak pilih, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penetapan jumlah pemilih di PDPB tahun 2025 KPU Kota Bontang melakukan pembersihan data pemilih ganda tersebut.

Sebagai langkah penanganan, KPU Kota Bontang melakukan pencermatan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang

secara otomatis akan menemukan data ganda. Proses penyelesaiannya yaitu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang terdapat pemilih ganda perihal *update* domisili terbaru dari pemilih dengan memperthankan data pemilih tersebut jika ditemukan data pemilih terbru berada di Kota Bontang, sehingga PDPB tahun 2025 Kota Bontang yang ditetapkan tidak terdapat data pemilih ganda.

Gambar 6
Sidalih Analisis Data Ganda

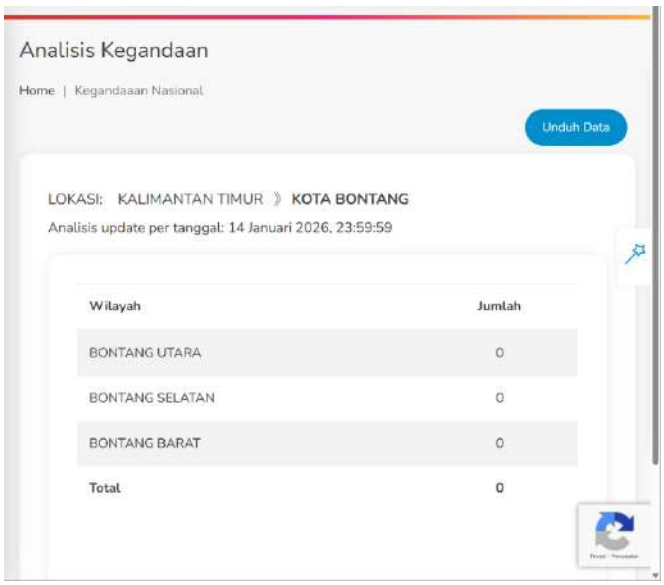

7. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2025, KPU Kota Bontang menetapkan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 90 persen. Berdasarkan hasil pengukuran, indikator yang dicapai sebesar 80.38 persen, sehingga capaian IKPA KPU Kota Bontang hanya di 89.3 persen.

Belum tercapainya target IKPA tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

a. Akurasi perencanaan anggaran yang masih belum optimal sehingga berdampak pada deviasi realisasi bulanan;
b. Capaian penyerapan anggaran perbelanja yang masih dalam proses pemenuhan target indikator triwulan;
c. Mekanisme penyampaian SPM yang masih membutuhkan penyesuaian agar terhindar dari dispensasi;
d. Ketepatan waktu pertanggungjawaban TUP yang perlu ditingkatkan konsistensinya dan
e. Pemanfaatan KKP yang belum dimaksimalkan.

Meskipun nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran berada di bawah target, KPU Kota Bontang tetap berupaya menjaga prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pelaksanaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas serta memastikan bahwa *output* kegiatan tetap tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Persentase kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU

Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja menunjukkan tingkat penilaian publik terhadap kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori sangat baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap kinerja yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan, profesionalisme aparatur, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat telah berjalan secara efektif. Meskipun demikian, masukan dan saran dari masyarakat tetap menjadi perhatian utama sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan, persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KPU Kota Bontang mencapai 88,53 persen**,** yang termasuk dalam kategori sangat baik, capaian ini melebihi dari target 73 persen dengan persentase realisasi 121,2 persen realisasi melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kinerja yang diberikan telah sesuai dengan harapan, baik dari aspek kualitas pelayanan, ketepatan waktu, maupun sikap petugas. Beberapa faktor yang membuat capaian melebihih target diantaranya:

Gambar 7
Fasilitas Ramah Disabilitas

a. Tersedianya layanan berupa *online* maupun *offline* PPID, layanan

PDPB, JDIH;

b. Pelaksanaan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Sarana dan prasarana yang ramah terhadap kaum disabilitas.

9. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu

Rekomendasi BPK dapat ditindak lanjuti dengan Baik dan Tepat Waktu, dan telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi tersebut, sehingga penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Capaian ini menjadi bukti komitmen KPU Kota Bontang dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meminimalkan temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya.

10. Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas KPU Kota Bontang dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan aset yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mencerminkan tata kelola yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Aset didukung oleh upaya peningkatan tertib administrasi pengelolaan BMN, pemutakhiran data aset secara berkala, serta koordinasi yang lebih intensif antara pengelola dan pengguna barang. Selain itu, KPU Kota Bontang juga telah melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkelanjutan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset.

Pada tahun 2025 KPU Kota Bontang mengadakan rekonsiliasi BMN sebanyak 2 kali di KPU Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk memastikan akurasi, validitas, dan kesesuaian agar dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel.

11. Tingakat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

KPU Kota Bontang telah melaksanakan berbagai upaya penguatan SPIP yang mencakup penerapan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pemutakhiran kebijakan internal, peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta penguatan peran pengawasan internal.

KPU Kota Bontang setiap bulan mengikuti rapat pleno pengisian kartu kendali SPIP tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 8
Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali SPIP

KPU Kota Bontang berkomitmen untuk terus meningkatkan Tingkat Maturitas SPIP melalui penguatan budaya pengendalian intern, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP secara berkelanjutan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

12. Nilai Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian indikator kinerja utama KPU Kota Bontang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja KPU Kota Bontang. capaian IKU KPU Kota Bontang secara umum berada pada kategori baik, yang mencerminkan sebagian besar target kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dilihat dari beberapa indikator yang realisasinya melebihi dari target, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya, dan kekurangan anggaran.

Tentunya KPU Kota Bontang menjadikan capaian IKU ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja dengan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, peningkatan profesionalitas SDM sehingga dapat berjalan optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

13. Tingkat Digitalisasi Arsip

Digitalisasi arsip merupakan salah satu upaya strategis KPU Kota Bontang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, mendukung keterbukaan informasi, serta memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan modern. Melalui digitalisasi arsip, KPU Kota Bontang berupaya menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan mudah diakses sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pada tahun 2025, KPU Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan digitalisasi arsip berdasarkan Surat Sekjen KPU RI Nomor 1543/TU.05.3-SD/05/2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi penataan arsip, alih media arsip statis dan dinamis, serta pengelolaan arsip digital melalui sistem informasi kearsipan. Kegiatan ini dbertujuan untuk mendukung tertib

administrasi, efisiensi kerja, serta percepatan layanan informasi internal maupun eksternal.

Pelaksanaan digitalisasi arsip memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan arsip, antara lain kemudahan dalam penelusuran arsip, pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan arsip dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, digitalisasi arsip juga mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

14. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Tata Kelola Pengadaan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tidak terkecuali KPU Kota Bontang. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta integritas dalam seluruh tahapan pengadaan.

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta penguatan fungsi pengendalian internal dan pengawasan. Di KPU Kota Bontang semua pengadaan baik berupa barang dan jasa semua dilakukan sesuai dengan peraturan.

KPU Kota Bontang juga telah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan guna memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas. Seperti mengikutkan sekretariat dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dimana saat ini KPU Kota Bontang telah memiliki 5 orang yang memiliki sertifikat PBJ.

Perbandingan realisasi anggaran KPU Kota Bontang tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi anggaran 2024 dengan 2025

NO	Program/Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	076.01.CO-Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38.034.219.000	23.413.959.778	61,56%	2.435.653.000	2.405.644.294	98.77%
2.	6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	25.657.790.000	11.211.593.943	43,70%	2.435.653.000	2.405.644.294	98.77%
3.	076.01.WA-Program Dukungan Manajemen	2.685.536.000	2.612.596.022	97,28%	3.564.381.000	3.559.457.616	99.86%
4.	3355 Pengelolaan Keuangan	2.548.374.000	2.475.781.372	97,15%	3.219.980.000	3.217.642.616	99.93%
5.	3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	137.162.000	136.814.650	99,75%	344.401.000	341.815.000	99.25%
6.	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.542.895.000	1.500.372.665	97,24%	1.542.895.000	1.500.372.665	97.24%
TOTAL		**40.719.755.000**	**26.026.555.800**	**63.92%**	**6.000.033.000**	**5.965.101.910**	**99.42%**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 atau pelaksanaan tugas dan fungsi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Bontang Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025-2029 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun.

Capaian realisasi kinerja KPU Tahun 2025 dapat disimpulkan dan tindakkan korekstif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2025 akan menjadi bahan input bagi penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian AKIP Tahun 2025.

Dari laporan terhadap capaian kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) dari indikator kinerja yang capaiannya diatas 100% sampai dengan Tahun 2025, yaitu:
   a. Indeks Reformasi Birokrasi, capaian ini sebesar 121% dengan realisasi 96,39 dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 80;
   b. Nilai SAKIP KPU Kota Bontang Tahun 2025, Capaian ini sebesar 103% dengan realisasi 72,2 dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 70;dan
   c. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU kota Bontang. Capaian ini sebesar 122,9% dengan realisasi 88,3 dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 72;
2. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya dibawah 100% sampai dengan Tahun 2025, yaitu:
   a. Indeks Pelayanan Publik capaian ini sebesar 98% dengan realisasi 88,53% tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 80%;
   b. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) capaian ini sebesar 89,3% dengan realisasi 80,38 tidak mencapai target tahunan sebesar 90.
3. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang capaiannya 100% sampai

dengan Tahun 2025, dengan kata lain sesuai dengan target perjanjian kinerja.

4. Realisasi penyerapan anggaran KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp5.965.101.910,-** (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari pagu **Rp6.000.033.000,-** (enam milyar tiga puluh tiga ribu rupiah) atau **99,42 persen** dan KPU Kota Bontang mencapai target Rincian Output.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Bontang pada tahun berikutnya berikutnya, antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sehingga untuk tahun berikutnya dapat sesuai dengan target;
2. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kota Bontang tahun 2024;
3. Memaksimalkan SDM yang ada dalam penggunaan sarana dan prasarana sehingga pelayanan tidak terhambat/terkendala.
4. Memelihara sarana dan prasarana yang ada dalam kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di KPU Kota Bontang;
5. terhadap indikator kinerja yang realisasinya melebihi target akan dipertahankan sehingga tahun berikutnya tidak mengalami penurunan.

Diharapkan KPU Kota Bontang melakukan hal-hal dalam memaksimalkan semua potensi yang ada sehingga capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat sesuai sengan target bahkan melampaunya.

LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUZARROBY RENFLY

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 31 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bontang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Muzarroby Renfly

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU Kota Bontang

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	**Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan**		
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90%
2.	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**		
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketetntuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%
		Tersedianya Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Telah dimutakhirkan melalui Aplikasi SIPOL	100%
3.	**Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien**		
	Terwujudnya Kelembangaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai SAKIP KPU	70
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	732
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%
		Indeks Pengelolaan Aset	3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		Tingkat Maturitas SPIP	75
		Nilai Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.435.652.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.363.291.000,-

Bontang, 31 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bontang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA BONTANG

Muzarroby Renfly

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN

2025

KATA
PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pada pelaksanaan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun mendatang.

Bontang, 13 Januari 2025
Ketua KPU Kota Bontang,

Muzarobby Renfly

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025 dalam periode tahunan dimana penyusunanannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksaanaan Tupoksi KPU Kota Bontang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi KPU Kota Bontang.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyusunanan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025 yang disusun melalui *e-planning* dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA -076.01.2.658919/2025 no

digital stamp: 6283-0320-0801-2828 yang dialokasikan/ditetapkan sebesar Rp. 2.680.616.000 tanggal 2 Desember 2024.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-kpt/01/kpu/iv/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2021 Tanggal 21 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2020-2024.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta taget pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparasi serta akuntabilitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kota Bontang berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Bontang terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akan dicapai pada periode 2025- 2029 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

a. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
b. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Tabel 2.2.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Bontang yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan riset kepemiluan	85%
		Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	89
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Opini BPK atas LaporaN Keuangan	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.				
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
			Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	77%
			Persentase KPU Kota Bontang Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang.	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2.2
Target Kinerja program dukungan Manajemen Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi			
		Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik.	Penyusunan regulasi logistik pemilu	85%
			Penyusunan Kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%
			Pengolahan data dan sistem informasi logistik	100%
		Pengelolaan pengadaan Logistik.	Persentase Penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian.	100%
			Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	100%
			Analisa penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%
			Persentase Sarana dan prasarana keperluan pemilu	100%
			Jumlah Penyusunan Laporan logistik pemilu	1 dok
			Penyusunan Startegi dan kebijakan Pengadaan Barang dan jasa	100%
			Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	100%
			Supervisi, monitoring dan inventarisasi pengadaan barang dan jasa	100%
			Pengelolaan, evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	100%
			Fasilitasi pelaksanaan dan Pelatihan Pengguna SPPE	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Fasilitasi Pengelolaan dan Pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa.	100%
			Fasilitasi pendampingan, konsultasi dan bimbingan tekhnis pengadaan barang/ jasa.	100%
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Dokumentasi Logistik pemilu	100%
			Fasilitasi ketatausahaan Biro	100%
2. Penguatan Kualitas perundangan-undangan				
		Kebijakan bidang politik	Kajian pembentukan peraturan perundang-undangan	100%
		Penguatan Kualitas perundang-undangan	Penyusunan peraturan perundang-undangan	100%
3. Hubungan Masyarakat,Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
		Fasilitasi dan pembinaan Lembaga	Fasilitasi Peliputan dan Pendokumentasian	100%
			Fasilitasi Humas dan dan Pustaka	100%
			Fasilitasi Informasi Publik dan Fasilitasi Peliputan dan Pendokumentasian	100%
			Jumlah Media Sosial	20
		Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar	Fasilitasi Pelaksanaan hubungan antar lembaga	100%
		Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	95%
4. Advokasi dan Sengketa Hukum				
		Jumlah Layanan Bantuan lembaga hukum	Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
		Penyuluhan Hukum	Fasilitasi kajian dan Pendapat hukum dalam permasalahan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Fasilitasi Pengadministrasian Dokumen Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa serta Pendapat Hukum dalam Permasalahan Pemilu/Pemilihan.	100%
5. Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
		- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - Fasilitasi Pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan	Fasilitasi Pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.	100%
6. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal				
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Persiapan Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	100%
			Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal.	100%
7. Program Dukungan Manajemen				
		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Kajian/Analisa Permasalahan Pengelolaan Keuangan	100%
			Pengelolaan Keuangan Berbasis Sistem Informasi	100%
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Administrasi Perbendaharaan	100%
			Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	100%
			Pelayanan Ketatausahaan Dokumen Keuangan	100%
			Penyusunan Laporan Keuangan	100%
			Penatausahaan Barang Milik Negara	100%
			Pengelolaan Simak BMN (UAPB dan E-1)	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Pengelolaan Simak UAKPB (Unit Akutansi Kuas Pengguna Barang)	100%
			Penghapusan Barang Milik Negara	100%
			Tuntutan ganti rugi (TGR)	100%
8. Manajemen Perencanaan dan Organisasi				
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengelolaan Bisnis Proses dan Prosedur Operasi Standar Organisasi	100%
			Pengelolaan Standar Pelayanan (Service Level Agreement)	100%
			Evaluasi Pengelolaan Layanan Administrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi.	100%
			Penyusunan Uraian Tugas dan Peta Jabatan Struktural Organisasi dan Tata Kerja KPU	100%
			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kelembagaan dan Organisasi	100%
			Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan KPU	100%
			Fasilitasi Program Reformasi Birokrasi	100%
			Fasilitasi Administrasi Kerjasama KPU	100%
			Fasilitasi Kerjasama dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100%
			Pengelolaan Arsip dan/atau dokumen Pemilu	100%
			Fasilitasi Dokumen Rapat	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Realisasi capaian Program/ Kegiatan/Anggaran	100%
			Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	100%
			Pembinaan Kinerja Anggaran Tingkat Satker	100%
			Fasilitasi Rapat Pimpinan/FGD/Konsinyering	100%
			Analisis Capaian Kinerja	100%
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	100%
			Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	100%
			Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi	100%
			Penyusunan Bahan Masukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	100%
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	100%
			Pengelolaan Program/Kegiatan/Anggaran	100%
			Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Anggaran	100%
9. Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
		- Layanan Manajemen SDM Internal (Orang,Layanan) - Layanan Manajemen SDM (Orang)	Proses Seleksi Calon Anggota KPU	100%
			Pembentukan/ Pengelolaan Badan Adhock dan data anggota KPU	100%
			Penilaian Kinerja Pegawai	100%
			Penegakkan Disiplin Pegawai	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Fasiitasi Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	100%
10. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
		- Layanan Dukungan manajeman Internal - Layanan Perkantoran - Layanan sarana dan prasarana Internal - Layanan sarana internal	Operasional dan Pemeliharaan perkantoran	100%
			Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100%
			Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%
11. Pemeriksaan Internal KPU				
		- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Audit Internal	Fasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
			Fasilitasi Laporan Hasil Reviu RKA-KL	100%
			Fasilitasi Pemeriksaan Pertangungjawaban Anggaran	100%
			Fasilitasi Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%
			Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi (LHKPN/ASN,aksi PPK WBS,Z1)	100%
			Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	100%
			Monitoring/Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	100%
			Fasilitasi Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan Apip KPU	100%
			Bimbingan Tekhnis/Sosialisasi Implementasi Aplikasi SPIP	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(*OUTCOME)*/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK,BPKP dan Inspektorat	100%
12. Data dan Informasi				
		- Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan Data dan Infromasi	Layanan Operasional dan Pelayanan IT	1 Lokasi
			Pemeliharaan Infrastruktur IT	98%
13. Pendataan DPT Berkelanjutan				
		- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga,Unit Kerja,Tim) - Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	100%
			Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	100%

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja KPU Kota Bontang tahun 2025 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pendanaan Target Indikator Kinerja KPU Kota Bontang
Tahun 2025

Kode Akun	Indikator	Pagu
3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	-
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	-
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Pubik dan Pendidikan Pemilih	-
7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	-

Kode Akun	Indikator	Pagu
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.379.659.000
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	300.957.000
6634	Data dan Informasi	-
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	-
Total		**2.680.616.000**

Catatan: Pendanaan 20025 diatas merupakan Dipa Awal, Pagu – Masih menunggu revisi Dipa dari KPU RI

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2025 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Tahun 2025.

Bontang,13 Januari 2025

Ketua KPU Kota Bontang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Muzarobby Renfly

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**40,719,755,000**	**0**	**14,195,176,325**	**11,831,379,475**	**26,026,555,800**	**63.92 %**	**14,693,199,200**
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38,034,219,000	0	11,731,688,585	11,682,271,193	23,413,959,778	61.56 %	14,620,259,222
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000338. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B TANPA SUB KOMPONERN	25,657,789,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,195,057
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	90,000,000	0	0	0	0	0.00 %	90,000,000
000344. Belanja Keperluan Perkantoran	90,000,000	0	0	0	0	0.00 %	90,000,000
521211 Belanja Bahan	10,697,230,000	0	0	3,148,689,930	3,148,689,930	29.43 %	7,548,540,070
000345. Belanja Bahan	10,697,230,000	0	0	3,148,689,930	3,148,689,930	29.43 %	7,548,540,070
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	927,334,000	0	0	32,848,000	32,848,000	3.54 %	894,486,000
000346. Belanja Honor Output Kegiatan	927,334,000	0	0	32,848,000	32,848,000	3.54 %	894,486,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,910,674,000	0	0	1,139,830,000	1,139,830,000	59.66 %	770,844,000
000347. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,910,674,000	0	0	1,139,830,000	1,139,830,000	59.66 %	770,844,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	806,481,000	0	0	806,480,155	806,480,155	100.00	845
000395. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	806,481,000	0	0	806,480,155	806,480,155	100.00	845
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	68,000,000	0	0	57,951,250	57,951,250	85.22 %	10,048,750
000348. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	68,000,000	0	0	57,951,250	57,951,250	85.22 %	10,048,750
522141 Belanja Sewa	420,300,000	0	0	9,098,000	9,098,000	2.16 %	411,202,000
000349. Belanja Sewa	420,300,000	0	0	9,098,000	9,098,000	2.16 %	411,202,000
522151 Belanja Jasa Profesi	953,200,000	0	0	213,300,000	213,300,000	22.38 %	739,900,000
000350. Belanja Jasa Profesi	953,200,000	0	0	213,300,000	213,300,000	22.38 %	739,900,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	4,420,149,000	0	0	3,314,387,032	3,314,387,032	74.98 %	1,105,761,968
000351. Belanja Jasa Lainnya	4,420,149,000	0	0	3,314,387,032	3,314,387,032	74.98 %	1,105,761,968
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,200,000	0	0	36,237,080	36,237,080	10.03 %	324,962,920
000352. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,200,000	0	0	36,237,080	36,237,080	10.03 %	324,962,920
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,116,147,000	0	0	1,428,192,496	1,428,192,496	45.83 %	1,687,954,504
000353. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,116,147,000	0	0	1,428,192,496	1,428,192,496	45.83 %	1,687,954,504
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,034,770,000	0	0	614,800,000	614,800,000	59.41 %	419,970,000
000354. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,034,770,000	0	0	614,800,000	614,800,000	59.41 %	419,970,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560,040,000	0	0	253,780,000	253,780,000	45.31 %	306,260,000
000355. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560,040,000	0	0	253,780,000	253,780,000	45.31 %	306,260,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292,264,000	0	0	156,000,000	156,000,000	53.38 %	136,264,000
000356. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292,264,000	0	0	156,000,000	156,000,000	53.38 %	136,264,000
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,384,645,000	0	820,778,270	453,566,450	1,274,344,720	92.03 %	110,300,280
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,356,734,000	0	794,208,370	453,566,450	1,247,774,820	91.97 %	108,959,180
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,092,271,000	0	568,983,320	435,478,450	1,004,461,770	91.96 %	87,809,230
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	1,092,271,000	0	568,983,320	435,478,450	1,004,461,770	91.96 %	87,809,230
111.0A Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	400,605,000	0	350,992,120	30,582,500	381,574,620	95.25 %	19,030,380
521211 Belanja Bahan	129,433,000	0	82,151,900	30,582,500	112,734,400	87.10 %	16,698,600
000001. Belanja Bahan	129,433,000	0	82,151,900	30,582,500	112,734,400	87.10 %	16,698,600
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	55,050,000	0	55,050,000	0	55,050,000	100.00	0
000003. 1) Pengarah (5 org x 3 bln x 1 keg)	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	100.00	0
000004. 2) Penanggungjawab (1 org x 3 bln x 1 keg)	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	100.00	0
000005. 3) Ketua1 (org x 3 bln x 1 keg)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000006. 4) Sekretaris (1 org x 3 bln x 1 keg)	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
000007. 5) Anggota (7 org x 3 bln x 1 keg)	19,950,000	0	19,950,000	0	19,950,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215,722,000	0	213,790,220	0	213,790,220	99.10 %	1,931,780

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000008. Belanja Perjalanan Biasa	215,722,000	0	213,790,220	0	213,790,220	99.10 %	1,931,780
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
000009. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
111.0B Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran	51,672,000	0	48,864,200	0	48,864,200	94.57 %	2,807,800
521211 Belanja Bahan	9,811,000	0	9,043,300	0	9,043,300	92.18 %	767,700
000010. Belanja Bahan	9,811,000	0	9,043,300	0	9,043,300	92.18 %	767,700
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,861,000	0	16,820,900	0	16,820,900	89.18 %	2,040,100
000011. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,861,000	0	16,820,900	0	16,820,900	89.18 %	2,040,100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	100.00	0
000012. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	100.00	0
111.0C Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi	158,508,000	0	96,919,500	60,560,200	157,479,700	99.35 %	1,028,300
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158,508,000	0	96,919,500	60,560,200	157,479,700	99.35 %	1,028,300
000013. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158,508,000	0	96,919,500	60,560,200	157,479,700	99.35 %	1,028,300
111.0D Layanan Perkantoran	199,918,000	0	72,207,500	62,767,750	134,975,250	67.52 %	64,942,750
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	40,738,000	0	9,609,300	11,354,900	20,964,200	51.46 %	19,773,800
000375. Belanja Keperluan Perkantoran	29,862,000	0	9,609,300	11,354,900	20,964,200	70.20 %	8,897,800
000386. Penggantian Inventaris Lama	10,876,000	0	0	0	0	0.00 %	10,876,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0	65,000	0	65,000	13.00 %	435,000
000376. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0	65,000	0	65,000	13.00 %	435,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,100,000	0	6,392,000	9,588,000	15,980,000	63.67 %	9,120,000
000377. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,100,000	0	6,392,000	9,588,000	15,980,000	63.67 %	9,120,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	25,000,000	0	21,075,000	0	21,075,000	84.30 %	3,925,000
000378. Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti	25,000,000	0	21,075,000	0	21,075,000	84.30 %	3,925,000
522111 Belanja Langganan Listrik	155,000	0	82,600	0	82,600	53.29 %	72,400
000379. Belanja Langganan Listrik	155,000	0	82,600	0	82,600	53.29 %	72,400
522112 Belanja Langganan Telepon	2,000,000	0	322,400	42,700	365,100	18.25 %	1,634,900

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000380. Belanja Langganan Telepon	2,000,000	0	322,400	42,700	365,100	18.26 %	1,634,900
522113 Belanja Langganan Air	1,275,000	0	961,100	0	961,100	75.38 %	313,900
000381. Belanja Langganan Air	1,275,000	0	961,100	0	961,100	75.38 %	313,900
522191 Belanja Jasa Lainnya	14,900,000	0	7,684,800	2,166,900	9,851,700	66.12 %	5,048,300
000382. Belanja Jasa Internet dan Layanan Zoom	14,900,000	0	7,684,800	2,166,900	9,851,700	66.12 %	5,048,300
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,600,000	0	2,044,000	273,000	2,317,000	11.82 %	17,283,000
000383. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,600,000	0	2,044,000	273,000	2,317,000	11.82 %	17,283,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,650,000	0	23,971,300	33,427,750	57,399,050	88.78 %	7,250,950
000384. Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor	64,650,000	0	23,971,300	33,427,750	57,399,050	88.78 %	7,250,950
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,000,000	0	0	5,914,500	5,914,500	98.58 %	85,500
000385. Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	6,000,000	0	0	5,914,500	5,914,500	98.58 %	85,500
111.0E INSENTIF PEMILU	281,568,000	0	0	281,568,000	281,568,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	281,568,000	0	0	281,568,000	281,568,000	100.00	0
000394. Belanja Honor Output Kegiatan	281,568,000	0	0	281,568,000	281,568,000	100.00	0
QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
052.0A Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
000020. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	248,600,000	0	209,362,950	18,088,000	227,450,950	91.49 %	21,149,050
052 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	248,600,000	0	209,362,950	18,088,000	227,450,950	91.49 %	21,149,050
052.0A Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID	248,600,000	0	209,362,950	18,088,000	227,450,950	91.49 %	21,149,050
521211 Belanja Bahan	153,600,000	0	141,009,750	6,828,000	147,837,750	96.25 %	5,762,250
000302. Belanja Bahan	153,600,000	0	141,009,750	6,828,000	147,837,750	96.25 %	5,762,250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	0	13,353,200	11,260,000	24,613,200	61.53 %	15,386,800
000370. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	0	13,353,200	11,260,000	24,613,200	61.53 %	15,386,800

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000014. Sosialisasi melalui Media Massa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
000016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	27,911,000	0	26,569,900	0	26,569,900	95.20 %	1,341,100
RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
110 Pengelolaan Sarana IT KPU	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
110.0A Rapat, identifikasi IT, koordinasi lintas sektor, ATK	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
521211 Belanja Bahan	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
000024. Belanja Bahan	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
RAN.002 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
052 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
052.0A Rapat identifikasi IT, KOORDINASI LINTAS SEKTOR, ATK	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
000022. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	7,960,866,000	0	7,955,362,400	0	7,955,362,400	99.93 %	5,503,600
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	7,960,866,000	0	7,955,362,400	0	7,955,362,400	99.93 %	5,503,600
QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	80,760,000	0	80,758,500	0	80,758,500	100.00	1,500
051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	80,760,000	0	80,758,500	0	80,758,500	100.00	1,500
051.0A Rapat - rapat, ATK, perlengkapan dukungan lainnya, Evaluasai	80,760,000	0	80,758,500	0	80,758,500	100.00	1,500
521211 Belanja Bahan	62,840,000	0	62,838,500	0	62,838,500	100.00	1,500
000320. Belanja Bahan	62,840,000	0	62,838,500	0	62,838,500	100.00	1,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,920,000	0	17,920,000	0	17,920,000	100.00	0
000321. Supervisi/Monitoring Keuangan ke Badan Adhoc	17,920,000	0	17,920,000	0	17,920,000	100.00	0
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0
051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0
051.0A Honorarium Badan Adhoc	5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0
000046. Anggota (30 org x 3 bln x 1 keg)	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	100.00	0
000048. Sekretaris (15 org x 3 bln x 1 keg)	51,750,000	0	51,750,000	0	51,750,000	100.00	0
000049. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis (90 org x 3 bln x 1 keg)	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000	100.00	0
000051. Ketua (532 org x 1 keg)	638,400,000	0	638,400,000	0	638,400,000	100.00	0
000052. Anggota (3192 org x 1 keg)	3,511,200,000	0	3,511,200,000	0	3,511,200,000	100.00	0
000053. Pengamanan TPS/Satlinmas (1064 org x 1 keg)	744,800,000	0	744,800,000	0	744,800,000	100.00	0
000054. Ketua (3 ORG X 3 BLN X 1 KEG)	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
000055. Anggota (12 ORG X 3 BLN X 1 KEG)	79,200,000	0	79,200,000	0	79,200,000	100.00	0
000057. Sekretaris (3 org x 3 bln x 1 keg)	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
000058. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis (6 org x 3 bln x 1 keg)	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000	100.00	0
000059. Tenaga Adm PPK (6 org x 3 bln x 1 keg)	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000	100.00	0
000061. Ketua (15 org x 3 bln x 1 keg)	67,500,000	0	67,500,000	0	67,500,000	100.00	0
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	2,489,806,000	0	2,484,303,900	0	2,484,303,900	99.78 %	5,502,100
051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	2,489,806,000	0	2,484,303,900	0	2,484,303,900	99.78 %	5,502,100
051.0A Dukungan Operasional Badan Adhoc, Transport, Perjalanan Dinas, Sewa, dll	667,000,000	0	664,000,000	0	664,000,000	99.55 %	3,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	667,000,000	0	664,000,000	0	664,000,000	99.55 %	3,000,000
000038. PPK (3 PKT X 3 BLN)	45,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	93.33 %	3,000,000
000039. PPS (15 PKT X 3 BLN)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	100.00	0
000040. TPS	532,000,000	0	532,000,000	0	532,000,000	100.00	0
051.0B DUKUNGAN OPERASIONAL BADAN ADHOC	1,822,806,000	0	1,820,303,900	0	1,820,303,900	99.86 %	2,502,100
521211 Belanja Bahan	505,102,000	0	505,102,000	0	505,102,000	100.00	0
000272. Konsumsi Bimtek PPK, PPS, KPPS	475,402,000	0	475,402,000	0	475,402,000	100.00	0
000372. Konsumsi Penghitungan Ulang Surat Suara	29,700,000	0	29,700,000	0	29,700,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,001,000	0	9,000,000	0	9,000,000	99.99 %	1,000
000274. Sewa Ruang Pertemuan PPK/PPS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000292. Rohaniwan	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000275. Narasumber	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130,128,000	0	130,126,900	0	130,126,900	100.00	1,100
000301. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,282,000	0	109,281,400	0	109,281,400	100.00	600
000371. Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS)	20,846,000	0	20,845,500	0	20,845,500	100.00	500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,176,075,000	0	1,176,075,000	0	1,176,075,000	100.00	0
000277. Supervisi/monitoring	49,875,000	0	49,875,000	0	49,875,000	100.00	0
000279. Bantuan Transport	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
000281. Bantuan transport	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	100.00	0
000283. Bantuan Transport (3724 x 2 Keg)	1,117,200,000	0	1,117,200,000	0	1,117,200,000	100.00	0
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
051 Persiapan Kampanye Pemilu	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
051.0A Penyusunan rencana kerja, rapat - rapat, koordinasi dengan pihak terkait	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
521211 Belanja Bahan	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
000285. Belanja Bahan	1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1,542,895,000	0	1,483,261,865	17,110,800	1,500,372,665	97.24 %	42,522,335
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,542,895,000	0	1,483,261,865	17,110,800	1,500,372,665	97.24 %	42,522,335
QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
051.0A Rapat, penyusunan bahan, koordinasi lintas sektor, ATK	24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
521211 Belanja Bahan	24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
000074. Belanja Bahan	24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,501,881,000	0	1,442,249,315	17,110,800	1,459,360,115	97.17 %	42,520,885

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,501,881,000	0	1,442,249,315	17,110,800	1,459,360,115	97.17 %	42,520,885
051.0B Konsumsi Tungsura dan Rekapitulasi Suara	444,042,000	0	431,794,450	0	431,794,450	97.24 %	12,247,550
521211 Belanja Bahan	280,782,000	0	280,782,000	0	280,782,000	100.00	0
000312. PPK	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	100.00	0
000313. PPS (15 PPS x 1 hari x 6 org)	5,130,000	0	5,130,000	0	5,130,000	100.00	0
000314. KPPS (532 TPS x 1 hari x 9 org)	272,916,000	0	272,916,000	0	272,916,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	40,750,000	0	40,750,000	81.50 %	9,250,000
000316. Santunan Bagi Penyelenggara Pemilu	50,000,000	0	40,750,000	0	40,750,000	81.50 %	9,250,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,700,000	0	28,702,450	0	28,702,450	90.54 %	2,997,550
000323. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,700,000	0	28,702,450	0	28,702,450	90.54 %	2,997,550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81,560,000	0	81,560,000	0	81,560,000	100.00	0
000317. Rekapitulasi Tingkat KPU	81,560,000	0	81,560,000	0	81,560,000	100.00	0
051.BA Penyusunan Strategi dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu dan Pemilihan	32,200,000	0	32,105,650	0	32,105,650	99.71 %	94,350
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,200,000	0	32,105,650	0	32,105,650	99.71 %	94,350
000325. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,200,000	0	32,105,650	0	32,105,650	99.71 %	94,350
051.BB Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu	111,210,000	0	111,210,000	0	111,210,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
000235. Tenaga Pendukung PPKom	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,710,000	0	100,710,000	0	100,710,000	100.00	0
000237. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,710,000	0	100,710,000	0	100,710,000	100.00	0
051.BC Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu	869,429,000	0	867,139,215	0	867,139,215	99.74 %	2,289,785
521211 Belanja Bahan	70,429,000	0	70,428,600	0	70,428,600	100.00	400
000319. Belanja Bahan	70,429,000	0	70,428,600	0	70,428,600	100.00	400
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	0	8,247,300	0	8,247,300	82.47 %	1,752,700
000239. Dukungan Internet, Listrik dan Air di gudang logistik	10,000,000	0	8,247,300	0	8,247,300	82.47 %	1,752,700
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	280,000,000	0	279,465,260	0	279,465,260	99.81 %	534,740

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000240. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	280,000,000	0	279,465,260	0	279,465,260	99.81 %	534,740
522191 Belanja Jasa Lainnya	509,000,000	0	508,998,055	0	508,998,055	100.00	1,945
000241. Tenaga Pengamanan Gudang Logistik (6 org x 3 bln)	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	100.00	0
000242. Pengelolaan dan Distribusi Logistik	446,000,000	0	445,998,055	0	445,998,055	100.00	1,945
051.BD PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU	45,000,000	0	0	17,110,800	17,110,800	38.02 %	27,889,200
521211 Belanja Bahan	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000388. Belanja Bahan	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000387. Belanja Honor Output Kegiatan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	17,110,800	17,110,800	85.55 %	2,889,200
000389. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	17,110,800	17,110,800	85.55 %	2,889,200
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	16,171,000	0	16,169,700	0	16,169,700	99.99 %	1,300
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	16,171,000	0	16,169,700	0	16,169,700	99.99 %	1,300
051.0A Rapat Penyusunan laporan, ATK, penggandaan, koordinasi	16,171,000	0	16,169,700	0	16,169,700	99.99 %	1,300
521211 Belanja Bahan	4,729,000	0	4,728,600	0	4,728,600	99.99 %	400
000076. Belanja Bahan	4,729,000	0	4,728,600	0	4,728,600	99.99 %	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,442,000	0	11,441,100	0	11,441,100	99.99 %	900
000077. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,442,000	0	11,441,100	0	11,441,100	99.99 %	900
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,458,799,000	0	1,448,297,650	0	1,448,297,650	99.28 %	10,501,350
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,458,799,000	0	1,448,297,650	0	1,448,297,650	99.28 %	10,501,350
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	34,843,000	0	34,842,300	0	34,842,300	100.00	700
051 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	34,843,000	0	34,842,300	0	34,842,300	100.00	700
051.0A Rapat, penyusunan materi, koordinasi lintas sektor, ATK	34,843,000	0	34,842,300	0	34,842,300	100.00	700
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	18,350,000	0	18,350,000	0	18,350,000	100.00	0
000094. Pengarah (5 org x 1 bln)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
000095. Penanggung jawab (1 org x 1 bln)	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000096. Ketua (1 org x 1 bln)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000097. Sekretaris (1 org x 1 bln)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
000098. Anggota (7 org x 1 bln)	6,650,000	0	6,650,000	0	6,650,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,493,000	0	16,492,300	0	16,492,300	100.00	700
000099. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,493,000	0	16,492,300	0	16,492,300	100.00	700
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,416,529,000	0	1,406,028,450	0	1,406,028,450	99.26 %	10,500,550
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1,416,529,000	0	1,406,028,450	0	1,406,028,450	99.26 %	10,500,550
051.0A Pelaksanaan tungsura, rekap berjenjang, pengiriman logistik ke Kab/Kota (gudang), bimtek badan adhoc	1,416,529,000	0	1,406,028,450	0	1,406,028,450	99.26 %	10,500,550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,351,000,000	0	1,340,500,000	0	1,340,500,000	99.22 %	10,500,000
000288. PPK (3 PPK x 7 Hari)	21,000,000	0	10,500,000	0	10,500,000	50.00 %	10,500,000
000290. TPS	1,330,000,000	0	1,330,000,000	0	1,330,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65,529,000	0	65,528,450	0	65,528,450	100.00	550
000326. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65,529,000	0	65,528,450	0	65,528,450	100.00	550
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
051.0A Rapat, penyusunan laporan, ATK, penggandaan, koordinasi	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
521211 Belanja Bahan	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
000100. Belanja Bahan	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	14,619,000	0	9,388,100	0	9,388,100	64.22 %	5,230,900
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	14,619,000	0	9,388,100	0	9,388,100	64.22 %	5,230,900
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
051 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
051.0A PENYIAPAN SUMPAH JANJI	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
521211 Belanja Bahan	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
000111. Belanja Bahan	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
051.0A PENYIAPAN SUMPAH JANJI	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
000112. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	12,659,000	0	12,654,500	0	12,654,500	99.96 %	4,500
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	12,659,000	0	12,654,500	0	12,654,500	99.96 %	4,500
QGE.001 Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	2,634,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.93 %	1,900
051 Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	2,634,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.93 %	1,900
051.0A Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	2,634,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.93 %	1,900
521211 Belanja Bahan	2,633,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.97 %	900
000117. Belanja Bahan	2,633,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.97 %	900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000118. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10,025,000	0	10,022,400	0	10,022,400	99.97 %	2,600
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10,025,000	0	10,022,400	0	10,022,400	99.97 %	2,600
051.0A Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10,025,000	0	10,022,400	0	10,022,400	99.97 %	2,600
521211 Belanja Bahan	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	100.00	0
000113. Belanja Bahan	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,793,000	0	7,792,400	0	7,792,400	99.99 %	600
000114. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,793,000	0	7,792,400	0	7,792,400	99.99 %	600
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000115. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000116. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,685,536,000	0	2,463,487,740	149,108,282	2,612,596,022	97.28 %	72,939,978
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628
001 Gaji dan Tunjangan	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,581,297,000	0	1,452,785,853	70,175,774	1,522,961,627	96.31 %	58,335,373
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	592,150,000	0	589,276,100	2,873,500	592,149,600	100.00	400
000119. Belanja Gaji Pokok PNS	592,150,000	0	589,276,100	2,873,500	592,149,600	100.00	400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	10,100	98	10,198	78.45 %	2,802
000120. Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	10,100	98	10,198	78.45 %	2,802
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,520,000	0	42,231,770	287,350	42,519,120	100.00	880
000122. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,520,000	0	42,231,770	287,350	42,519,120	100.00	880
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	12,985,000	0	12,927,278	57,470	12,984,748	100.00	252
000123. Belanja Tunj. Anak PNS	12,985,000	0	12,927,278	57,470	12,984,748	100.00	252
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	0	32,760,000	0	32,760,000	100.00	0
000124. Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	0	32,760,000	0	32,760,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000125. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,611,000	0	3,217,270	0	3,217,270	69.77 %	1,393,730
000126. Belanja Tunj. PPh PNS	4,611,000	0	3,217,270	0	3,217,270	69.77 %	1,393,730
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	35,486,000	0	35,268,540	217,260	35,485,800	100.00	200
000141. Belanja Tunj. Beras PNS	35,486,000	0	35,268,540	217,260	35,485,800	100.00	200
511129 Belanja Uang Makan PNS	105,998,000	0	74,018,000	19,907,000	93,925,000	88.61 %	12,073,000
000127. Belanja Uang Makan PNS	105,998,000	0	74,018,000	19,907,000	93,925,000	88.61 %	12,073,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	25,830,000	0	25,645,000	185,000	25,830,000	100.00	0
000128. Belanja Tunjangan Umum PNS	25,830,000	0	25,645,000	185,000	25,830,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	728,943,000	0	637,431,795	46,648,096	684,079,891	93.85 %	44,863,109
000129. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	728,943,000	0	637,431,795	46,648,096	684,079,891	93.85 %	44,863,109

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001.0B Uang Kehormatan	836,803,000	0	768,501,821	67,766,208	836,268,029	99.94 %	534,971
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	836,803,000	0	768,501,821	67,766,208	836,268,029	99.94 %	534,971
000130. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	836,803,000	0	768,501,821	67,766,208	836,268,029	99.94 %	534,971
001.0C PPPK	130,274,000	0	105,385,416	11,166,300	116,551,716	89.47 %	13,722,284
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	52,000,000	0	51,257,600	0	51,257,600	98.57 %	742,400
000357. Belanja Gaji Pokok PPPK	52,000,000	0	51,257,600	0	51,257,600	98.57 %	742,400
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	613	300	913	91.30 %	87
000358. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	613	300	913	91.30 %	87
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,300,000	0	3,203,600	0	3,203,600	97.08 %	96,400
000359. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,300,000	0	3,203,600	0	3,203,600	97.08 %	96,400
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,795,000	0	1,601,800	0	1,601,800	89.24 %	193,200
000360. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,795,000	0	1,601,800	0	1,601,800	89.24 %	193,200
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,640,000	0	6,480,000	2,160,000	8,640,000	100.00	0
000361. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,640,000	0	6,480,000	2,160,000	8,640,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,700,000	0	3,693,420	0	3,693,420	99.82 %	6,580
000362. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,700,000	0	3,693,420	0	3,693,420	99.82 %	6,580
511626 Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000363. Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511628 Belanja Uang Makan PPPK	11,058,000	0	4,847,000	2,368,000	7,215,000	65.25 %	3,843,000
000364. Belanja Uang Makan PPPK	11,058,000	0	4,847,000	2,368,000	7,215,000	65.25 %	3,843,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000365. Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512212 Belanja Uang Lembur PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000366. Belanja Uang Lembur PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	49,777,000	0	34,301,383	6,638,000	40,939,383	82.25 %	8,837,617
000367. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	49,777,000	0	34,301,383	6,638,000	40,939,383	82.25 %	8,837,617

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
EBA.994 Layanan Perkantoran	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
002.0A LAYANAN PERKANTORAN	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	23,550,000	0	23,515,900	0	23,515,900	99.86 %	34,100
000131. Penggantian Inventaris Lama	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	100.00	0
000132. ATK, Jamuan Makan/Konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai, Rapat dengan instansi	20,450,000	0	20,415,900	0	20,415,900	99.83 %	34,100
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000133. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,400,000	0	22,372,000	0	22,372,000	99.88 %	28,000
000134. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,400,000	0	22,372,000	0	22,372,000	99.88 %	28,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000135. Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522111 Belanja Langganan Listrik	23,900,000	0	23,844,900	0	23,844,900	99.77 %	55,100
000136. Belanja Langganan Listrik	23,900,000	0	23,844,900	0	23,844,900	99.77 %	55,100
522112 Belanja Langganan Telepon	550,000	0	533,100	0	533,100	96.93 %	16,900
000368. Belanja Langganan Telepon	550,000	0	533,100	0	533,100	96.93 %	16,900
522113 Belanja Langganan Air	1,750,000	0	1,725,300	0	1,725,300	98.59 %	24,700
000322. Belanja Langganan Air	1,750,000	0	1,725,300	0	1,725,300	98.59 %	24,700
522191 Belanja Jasa Lainnya	13,100,000	0	13,064,450	0	13,064,450	99.73 %	35,550
000137. Belanja Jasa Internet dan Layanan Zoom	13,100,000	0	13,064,450	0	13,064,450	99.73 %	35,550
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,450,000	0	3,406,200	0	3,406,200	98.73 %	43,800
000138. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,450,000	0	3,406,200	0	3,406,200	98.73 %	43,800
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,360,000	0	48,352,800	0	48,352,800	99.99 %	7,200
000139. Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor	48,360,000	0	48,352,800	0	48,352,800	99.99 %	7,200

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
	000140. Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**6,000,033,000**	**0**	**5,547,940,292**	**417,161,618**	**5,965,101,910**	**99.42 %**	**34,931,090**
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B TANPA SUB KOMPONERN	2,435,651,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,006,706
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	6,291,000	0	6,290,500	0	6,290,500	99.99 %	500
521211 Belanja Bahan	252,739,000	0	252,738,900	0	252,738,900	100.00	100
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	22,727,000	0	22,726,500	0	22,726,500	100.00	500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	102,949,000	0	102,948,632	0	102,948,632	100.00	368
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	39,037,000	0	9,036,400	0	9,036,400	23.15 %	30,000,600
522141 Belanja Sewa	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	247,098,000	0	247,097,262	0	247,097,262	100.00	738
522191 Belanja Jasa Lainnya	774,614,000	0	774,613,200	0	774,613,200	100.00	800
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,031,000	0	69,030,950	0	69,030,950	100.00	50
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	770,054,000	0	770,053,950	0	770,053,950	100.00	50
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149,808,000	0	149,808,000	0	149,808,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
WA Program Dukungan Manajemen	3,564,381,000	0	3,142,295,998	417,161,618	3,559,457,616	99.86 %	4,923,384
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384
001 Gaji dan Tunjangan	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,745,189,000	0	1,614,108,667	129,045,909	1,743,154,576	99.88 %	2,034,424
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	668,166,000	0	668,165,260	0	668,165,260	100.00	740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	9,567	0	9,567	95.67 %	433
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,981,000	0	43,980,170	0	43,980,170	100.00	830
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	14,274,000	0	14,273,862	0	14,273,862	100.00	138
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	46,800,000	0	46,800,000	0	46,800,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	3,390,000	0	3,389,782	0	3,389,782	99.99 %	218
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	38,166,000	0	38,165,340	0	38,165,340	100.00	660
511129 Belanja Uang Makan PNS	120,061,000	0	96,540,000	21,491,000	118,031,000	98.31 %	2,030,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	24,905,000	0	24,905,000	0	24,905,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	785,435,000	0	677,879,686	107,554,909	785,434,595	100.00	405
001.0B Uang Kehormatan	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
001.0C PPPK	629,446,000	0	487,838,531	141,305,009	629,143,540	99.95 %	302,460
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	250,916,000	0	209,662,999	41,252,100	250,915,099	100.00	901
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	3,979	629	4,608	92.16 %	392
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,306,000	0	15,019,439	2,286,040	17,305,479	100.00	521
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,136,000	0	5,528,021	607,898	6,135,919	100.00	81
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,090,000	0	14,850,000	3,240,000	18,090,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,830,000	0	16,366,920	2,462,280	18,829,200	100.00	800
511626 Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511628 Belanja Uang Makan PPPK	54,316,000	0	36,756,000	17,264,000	54,020,000	99.46 %	296,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,580,000	0	8,965,000	1,615,000	10,580,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
512212 Belanja Uang Lembur PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	253,264,000	0	180,686,173	72,577,062	253,263,235	100.00	765
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344,401,000	0	195,004,300	146,810,700	341,815,000	99.25 %	2,586,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	323,422,000	0	174,025,300	146,810,700	320,836,000	99.20 %	2,586,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	323,422,000	0	174,025,300	146,810,700	320,836,000	99.20 %	2,586,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	323,422,000	0	174,025,300	146,810,700	320,836,000	99.20 %	2,586,000
002.0A LAYANAN PERKANTORAN	248,925,000	0	146,338,800	100,485,500	246,824,300	99.16 %	2,100,700
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	50,541,000	0	24,846,900	23,665,500	48,512,400	95.99 %	2,028,600
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	280,000	0	279,500	0	279,500	99.82 %	500
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,560,000	0	43,060,000	7,500,000	50,560,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	50,928,000	0	40,968,400	9,924,500	50,892,900	99.93 %	35,100
522112 Belanja Langganan Telepon	368,000	0	287,900	79,800	367,700	99.92 %	300
522113 Belanja Langganan Air	2,519,000	0	2,160,900	358,100	2,519,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	12,431,000	0	11,150,100	1,280,400	12,430,500	100.00	500
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,728,000	0	3,179,000	7,549,000	10,728,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,695,000	0	17,894,000	20,766,000	38,660,000	99.91 %	35,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,875,000	0	2,512,100	29,362,200	31,874,300	100.00	700
002.0B SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH	2,800,000	0	0	2,756,000	2,756,000	98.43 %	44,000
521211 Belanja Bahan	2,800,000	0	0	2,756,000	2,756,000	98.43 %	44,000
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	38,584,000	0	4,394,200	33,829,200	38,223,400	99.07 %	360,600
521211 Belanja Bahan	4,000,000	0	0	3,919,200	3,919,200	97.98 %	80,800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,584,000	0	4,394,200	29,910,000	34,304,200	99.19 %	279,800
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
002.0E RAPAT PLENO PDPB TA 2025	26,480,000	0	16,669,900	9,740,000	26,409,900	99.74 %	70,100
521211 Belanja Bahan	10,072,000	0	262,500	9,740,000	10,002,500	99.31 %	69,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,528,000	0	5,527,400	0	5,527,400	99.99 %	600

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,880,000	0	10,880,000	0	10,880,000	100.00	0
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	6,623,000	0	6,622,400	0	6,622,400	99.99 %	600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,623,000	0	6,622,400	0	6,622,400	99.99 %	600
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
053.0A Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6792-4587-7050-4047

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658919/2025

Revisi ke 15
Tanggal : 19 Januari 2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(076)	KOMISI PEMILIHAN UMUM
2. Unit Organisasi	:	(01)	Komisi Pemilihan Umum
3. Provinsi	:	(16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(658919)	KPU KOTA BONTANG
Sebesar	:	Rp. 6.000.033.000	(ENAM MILIAR TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	3.564.382.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	2.435.651.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	2.435.651.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 6.000.033.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025

DS:6792-4587-7050-4047

Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	2.435.652.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.	2.435.652.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.564.381.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.219.980.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	344.401.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				2.435.652.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada				2.435.652.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim		2.435.652.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.00	Lembaga		2.435.652.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen				3.564.381.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan				3.219.980.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.219.980.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		3.219.980.000
Kegiatan	:	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				344.401.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		323.422.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		323.422.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket		20.979.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		20.979.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.

Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025

DS:6792-4587-7050-4047

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

							Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	6.000.033.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.564.382.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	2.435.651.000		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	2.435.651		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKOTABON	IDR	2.435.651,00					
		1232/KU.07-NK/64	USD						
		257CZHEA	IDR	2.435.651,00					
					5	2.435.651			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025

DS:6792-4587-7050-4047

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
658919	**KPU KOTA BONTANG**	**3.219.980**	**2.759.073**	**20.980**	**-**	**-**	**6.000.033**		
076.01.CQ	**Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**	**-**	**2.435.651**	**1**	**-**	**-**	**2.435.652**		
6639	**Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada**	**-**	**2.435.651**	**1**	**-**	**-**	**2.435.652**		
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (16.54 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG)	-	2.435.651	1	-	-	2.435.652	16 . 54	
01	RM	-	1	-	-	-	1	046	
10	HLD	-	2.435.650	1	-	-	2.435.651	046	257CZHEA
076.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.219.980**	**323.422**	**20.979**	**-**	**-**	**3.564.381**		
3355	**Pengelolaan Keuangan**	**3.219.980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.219.980**		
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (16.54 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG)	3.219.980	-	-	-	-	3.219.980	16 . 54	
01	RM	3.219.980	-	-	-	-	3.219.980	046	
3360	**Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**	**-**	**323.422**	**20.979**	**-**	**-**	**344.401**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025

DS:6792-4587-7050-4047

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	323.422	-	-	-	323.422	16 . 54	
	(16.54 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG)								
01	RM	-	323.422	-	-	-	323.422	046	
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	20.979	-	-	20.979	16 . 54	
	(16.54 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG)								
01	RM	-	-	20.979	-	-	20.979	046	
	JUMLAH	**3.219.980**	**2.759.073**	**20.980**	**-**	**-**	**6.000.033**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**658919**	**KPU KOTA BONTANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	158.951	158.951	158.951	411.690	1.541.536	439.263	438.090	434.123	455.917	184.528	211.480	1.406.554	6.000.033
		BELANJA PEGAWAI	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	178.841	205.224	272.720	202.336	166.810	154.995	1.244.299	3.219.980
		BELANJA BARANG	0	0	0	252.739	1.382.584	260.422	232.866	161.403	253.581	17.718	35.506	162.255	2.759.073
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20.979	0	20.980
	076.01.CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	0	0	0	252.739	1.354.127	231.964	201.599	139.476	222.990	1.256	1.256	30.246	2.435.652
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	252.739	1.354.126	231.964	201.599	139.476	222.990	1.256	1.256	30.246	2.435.651
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	076.01.WA.3355	Pengelolaan Keuangan	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	178.841	205.224	272.720	202.336	166.810	154.995	1.244.299	3.219.980
		51 BELANJA PEGAWAI	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	178.841	205.224	272.720	202.336	166.810	154.995	1.244.299	3.219.980
	076.01.WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	0	0	0	0	28.459	28.459	31.267	21.927	30.592	16.462	55.229	132.009	344.401
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	28.459	28.459	31.267	21.927	30.592	16.462	34.250	132.009	323.422
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.979	0	20.979

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
IV A. B L O K I R

DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [658919] KPU KOTA BONTANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
IV B. C A T A T A N

DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [658919] KPU KOTA BONTANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001